BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara secara transparansi dan akuntabilitas yang terdapat pada bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini mencerminkan upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah pemerintah daerah wajib menyusun setidaknya tujuh jenis laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu sendiri merupakan dokumen yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk memberikan gambaran lengkap dan transparan mengenai kondisi keuangan daerah. Adapun pihak yang menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diantaranya adalah pemerintah daerah, untuk mengelola dan memantau keuangan daerah. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai fungsi pengawasan pembuatan kebijakan. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digunakan untuk melakukan audit dan evaluasi keuangan. Sedangkan secara lebih rinci Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal (Fitria, 2006). Maka dari itu audit laporan keuangan penting untuk dilakukan. Audit keuangan dilakukan oleh BPK, audit tersebut bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran informasi laporan keuangan pemerintah.

Hal pertama yang menjadi faktor tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Kepatuhan Perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kriteria penting dalam pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 juga sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan secara akurat dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun tujuan utama Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang andal, relevan, dan dapat diperbandingkan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Hal kedua yang menjadi faktor tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah kecukupan pengungkapan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Didalam PP tersebut dijelaskan bahwa pengungkapan adalah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun tujuan dari kecukupan pengungkapan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Hal ketiga yang menjadi faktor tercapainya opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada saat auditor memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini berarti auditor memiliki bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung pendapat bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Singkatnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan, dalam semua aspek material, disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga menunjukkan bahwa auditor telah memeriksa seluruh aspek penting dari laporan keuangan dan tidak menemukan kesalahan material yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan atau entitas memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Opini ini memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan pemerintah, bahwa laporan keuangan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan karena disusun dengan transparansi dan akurasi yang tinggi. Dengan demikian, opini audit (WTP) menunjukkan bahwa entitas telah melaksanakan kewajiban pelaporan keuangan dengan baik.

Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari Kabupaten Bengkalis yang telah mendapatkan opini audit (WTP) 11 kali secara berturut-turut, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2023 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari kerja sama yang kuat antara pemangku kepentingan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis, termasuk pengelola keuangan dan staf yang terlibat. Opini WTP dari BPK ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis telah dilaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menerima Opini WTP juga bisa menjadi insentif bagi pemerintah di semua

tingkatan untuk meningkatkan pengelolaan. Selain itu, dengan didukung oleh kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga terus berusaha untuk mencapai kemajuan. Hasil ini akan meningkatkan reputasi Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah yang memiliki pengelolaan yang baik di Indonesia, khususnya di Riau.

Tabel 1.1 Penilaian BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Terhadap LKPD Bengkalis

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Bengkalis	Tahun	Penilaian BPK RI
1	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2011	Tidak wajar (TW)
2	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelas
4	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelas
5	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
12	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
13	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis (2025)

Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis telah menyusun laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan ini berfungsi sebagai sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan bertanggungjawab, dan mampu menanggapi perubahan secara efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan SKPD dan BLUD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, yang disusun berdasarkan SAP sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan Kabupaten Bengkalis penting untuk di identifikasikan guna mengetahui informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya opini audit WTP secara berkelanjutan oleh BPK.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tercapainya Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan perundang-undangan berpengaruh terhadap tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?
2. Apakah kecukupan pengungkapan berpengaruh terhadap tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?
4. Apakah kepatuhan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar penelitian ini dapat lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya opini audit WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kepatuhan perundang-undangan berpengaruh terhadap tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?
2. Untuk mengetahui apakah kecukupan pengungkapan berpengaruh terhadap tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?
3. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?
4. Untuk mengetahui apakah kepatuhan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya opini audit WTP atas LKPD Kabupaten Bengkalis.
2. Bagi instansi, sebagai rekomendasi bagi instansi mengenai pentingnya kepatuhan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, serta SPI pada LKPD Kabupaten Bengkalis.

3. Bagi pembaca, sebagai bahan literasi guna mengembangkan pengetahuan tentang pentingnya kepatuhan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, serta peran SPI dalam penyusunan LKPD Kabupaten Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat, sistematika penulisan akan dibagi kedalam lima bab, diantaranya yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulisan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang sesuai dengan pokok bahasan pada penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Dalam bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN